



bank nbp
pt bpr nbp 7

PT BPR NBP 7



2025
LAPORAN
KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY
REPORT

Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan	1
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan	8
3. Profil Bank	13
4. Penjelasan Direksi	17
5. Tata Kelola Keberlanjutan	21
6. Kinerja Keberlanjutan	26
6.1. Kinerja Ekonomi	26
6.2. Kinerja Sosial	28
6.3. Kinerja Lingkungan Hidup	29
6.4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	30
Umpan Balik	32

Kata Pengantar

Di tahun 2025, BPR NBP 7 telah melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025 sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. BPR NBP 7 menerapkan program-program kerja yang disusun dalam RAKB sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

BPR (Bank Perekonomian Rakyat) sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyadari pentingnya isu pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip *triple bottom line* yaitu *people* (kesejahteraan masyarakat), *profit* (keuntungan) dan *planet* (lingkungan hidup) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST).

BPR NBP 7 sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat, BPR dituntut untuk bisa selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur dengan menghindarkan pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup, fokus pada usaha debitur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga BPR mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga kredit.

Dalam hal ini BPR NBP 7 berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagai langkah bersama bagi Sektor Jasa Keuangan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut Keberlanjutan Bank sebab ketidakpedulian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial dapat meningkatkan risiko bagi Perbankan khususnya peningkatan risiko kredit akibat kegagalan bayar (*default*) debitur yang memiliki usaha berdampak negatif terhadap lingkungan dan kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Keberlanjutan (SR – *Sustainability Report*) BPR NBP 7 Tahun 2025 ini berisi informasi mengenai kinerja keberlanjutan Bank dalam bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial kepada seluruh pemangku kepentingan. BPR NBP 7 dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar, sebagaimana ketentuan dari OJK untuk pertama kali menyusun Laporan Keberlanjutan di tahun 2026 yaitu Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 dan wajib disampaikan ke OJK secara luring (*offline*) paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan yang berlaku. Dengan demikian BPR NBP 7 menyusun Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 yang memuat informasi untuk periode pelaporan 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Pedoman Teknis Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017.



1.

Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan

Tentang Laporan Keberlanjutan

Sesuai POJK No. 51 / POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif mewajibkan BPR/ BPRS untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk itu BPR/ BPRS wajib menyusun dan **menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) atau SR (Sustainability Report) Tahun 2025 ke OJK paling lambat tanggal 30 April 2026** bersamaan dengan Laporan Tahunan BPR/BPRS Tahun 2025.



Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Mengacu pada Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bahwa format penulisan Laporan Keberlanjutan sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan
2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup)
3. Profil Singkat BPR/BPRS
4. Penjelasan Direksi
5. Tata kelola keberlanjutan
6. Kinerja keberlanjutan
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen
8. Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca dan
9. Tanggapan BPR/BPRS terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.



Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan BPR NBP 7 tahun 2025 disusun dengan mengakomodir standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini tidak lepas dari laporan tahunan yang telah disusun dengan laporan keuangan teraudit untuk tahun buku 2025. BPR NBP 7 membuat dan melaporkan kinerja keberlanjutan dalam periode 1 (satu) tahun buku (tahunan) mulai tahun 2025 ini. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan BPR NBP 7 tahun 2025 ini memuat data dan informasi yang dikumpulkan dalam 1 (satu) tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Prinsip penetapan konten dalam Laporan ini didasarkan pada POJK 51/POJK.03/2017 dan disusun berdasarkan 2 prinsip, yaitu prinsip isi dan kualitas.

Prinsip isi meliputi:

1. Konteks berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) ini disusun sejalan dengan konteks keuangan berkelanjutan.
2. Kelengkapan: Informasi disajikan sebagai informasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan kelengkapan bagi pembaca.

Prinsip kualitas adalah:

1. Keseimbangan: Informasi terkait capaian dan prestasi, serta tantangan disampaikan sesuai dengan kondisi perusahaan.
2. Komparabilitas: Data yang disampaikan dalam laporan disajikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Akurasi: Angka dan informasi telah diperiksa secara internal Perusahaan sehingga diyakini akurasi.
4. Ketepatan waktu: Laporan ini disajikan tepat waktu bersama dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan: Informasi yang disajikan dalam laporan mudah untuk dipahami.

Topik material dalam Laporan ini adalah topik- topik yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Penetapan aspek material dan batasan didasarkan pada isu- isu yang berpengaruh signifikan bagi BPR NBP 7 serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR mengacu pada 8 (delapan) Prinsip keuangan berkelanjutan, dan 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/2017. Delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang dikembangkan oleh BPR NBP 7:

1. **Investasi yang bertanggung jawab;** adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi yang bertujuan agar dapat mengelola risiko secara lebih baik. Kami menerapkan prinsip ini melalui pemberian kredit yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dengan menganalisis potensi risiko yang ditimbulkan dari usaha yang dibiaya oleh Bank.
2. **Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan;** Kami menerapkan prinsip ini dengan menuangkannya pada kebijakan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) yang menjadi landasan BPR NBP 7 dalam menjalankan bisnis berkelanjutan di kegiatan usaha Bank.
3. **Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup ;** Kami telah memiliki prinsip kehati- hatian (*Prudential Banking*) dalam mengukur risiko yang dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Bank. Selain risiko- risiko finansial, kami juga melakukan proses manajemen risiko khususnya mengukur risiko pemberian kredit atau pinjaman yang bersentuhan langsung dengan aspek sosial dan lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
4. **Prinsip Tata Kelola;** Kami menerapkan tata kelola keberlanjutan (ekonomi, lingkungan dan sosial) yang dibangun berdasarkan prinsip- prinsip penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan kewajaran.
5. **Prinsip Komunikasi yang Informatif;** Kami menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek Bank yang dapat dengan mudah diakses oleh para *stakeholder* melalui situs web BPR Nusantara Bona Pasogit Tujuh <https://>



www.bprgodital.co.id

6. **Prinsip Inklusif;** Bank menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/ atau jasa yang dapat dengan mudah diakses oleh nasabah. Bank memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan yang keuangan BPR Nusantara Bona Pasogit Tujuh.
7. **Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas** ; Dalam menyusun program keberlanjutan, kami mempertimbangkan sektor- sektor unggulan prioritas yang telah kami tetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Hal ini kami lakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung program pemerintah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. **Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi;** Kami membuka diri untuk berkomunikasi dan berkerja sama dengan lembaga atau pemerintahan setempat terkait Bisnis Berkelanjutan dalam rangka penyelarasan strategi keberlanjutan Bank. Hal ini terlihat dari keanggotaan perusahaan pada perbarindo dan partisipasi dalam mendukung kegiatan- kegiatan yang memberdayakan masyarakat.

Sedangkan **tiga prioritas RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)** adalah:

1. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, antara lain mengidentifikasi dan memonitor portofolio pembiayaan Bank yang menunjang keuangan berkelanjutan.
2. Pengembangan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan meningkatkan *awareness* mengenai keuangan berkelanjutan (untuk pegawai dan nasabah), implementasi keuangan berkelanjutan pada sektor-sektor usaha yang menjadi fokus Bank.
3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar prosedur operasional, antara lain menyiapkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan, penyesuaian kebijakan internal Bank lainnya seperti Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, Kebijakan tata kelola keberlanjutan.



Strategi Keberlanjutan

Strategi keuangan berkelanjutan disusun berdasarkan pertimbangan visi dan misi Bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Bagi Bank, penerapan keuangan berkelanjutan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun juga sebagai strategi untuk mewujudkan visi Bank khususnya dalam penerapan prinsip inklusi keuangan.

Segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang menjadi sasaran utama Bank dalam pelayanan jasa keuangan diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Selain itu, melalui pengembangan produk dan/ atau jasa keuangan berwawasan lingkungan, Bank berupaya meningkatkan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs – *Sustainable Development Goals*). Hal ini diwujudkan dalam berbagai upaya, di antaranya dengan menyusun rencana kerja, dan mengembangkan RAKB sesuai dengan ketentuan regulator.

Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun

2012 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas, BPR NBP 7 mulai menerapkan prinsip-prinsip *go green company* sejak penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1. Mengampanyekan efisiensi penggunaan air di setiap toilet yang berada di lingkungan kantor BPR dengan memasang pamflet “Gunakan air seperlunya”, “Hemat air”, atau “Matikan air setelah selesai digunakan”.
2. Mengampanyekan lingkungan kerja menjadi lebih sehat dengan motto “BERSIH itu SEHAT” dengan memasang pamflet di tempat-tempat yang mudah terlihat. .
3. Menjalankan program “Hemat Energi” dengan pembatasan penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja dan mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.
4. Program penggunaan *tumbler* sebagai pengganti gelas air minum atau air dalam kemasan.



2.

Ikhtisar Aspek Keberlanjutan

Aspek Ekonomi

Tabel 2.1 Ikhtisar Kinerja Aspek Ekonomi

Nominal uang dalam jutaan rupiah

Keterangan	2025	2024	2023
Pendapatan Operasional Bank (Rp)	13.887	10.591	9.875
Laba Bersih Bank (Rp)	2.001,12	1.546,31	1.582
Kinerja Aspek Ekonomi terkait Keberlanjutan			
Jumlah jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan	0	0	0
Nominal produk penghimpunan dana yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)	0	0	0
Nominal produk penyaluran dana yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)	0	0	0
Persentase total portofolio kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total portofolio (%)			
a. Penghimpunan Dana (%)	0	0	0
b. Penyaluran Dana (%)	0	0	0
Kinerja Keuangan Inklusif			
Perkembangan Laku Pandai			
a. Jumlah Agen	0	0	0
b. Nominal produk dan/atau jasa yang disediakan oleh Agen	0	0	0

Pemberian layanan keuangan di segmen UMKM, yang menjadi fokus utama Bank, merupakan segmen pasar yang sangat potensial. UMKM, yang termasuk dalam salah satu kategori KUB (Kategori Usaha Berkelanjutan), saat ini telah menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip investasi bertanggung jawab dimana Bank mempertimbangkan peningkatan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasabah dalam penyaluran dana.



Aspek Lingkungan Hidup

Tabel 2.2 Ikhtisar Kinerja Aspek Lingkungan Hidup

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	2025	2024	2023
Beban Penggunaan Kertas (Rp)	10.044.500	9.487.000	9.710.000
Beban Penggunaan Listrik (Rp)	25.252.459	20.388.000	19.425.800
Beban Penggunaan Air (Rp)	2.478.740	1.310.000	1.366.500
Beban Penggunaan BBM (Rp)	121.395.170	120.516.100	145.769.540

Kriteria KUB (Kredit usah Berkelanjutan) yang diharapkan untuk didukung oleh lembaga keuangan mencakup efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Bank menyadari bahwa untuk mendorong masyarakat mengembangkan kegiatan usaha yang mempertimbangkan dampak lingkungan harus dimulai

dari cara Bank beroperasi.

Sebagaimana tercantum pada RAKB 2025, Bank telah menempatkan operasional bank ramah lingkungan sebagai bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan. Dalam rangka memastikan kegiatan operasional dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, budaya kesadaran lingkungan penting untuk dibangun di dalam Bank. Oleh karena itu, Bank berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan data lingkungan di Kantor pada tahun 2025.

Dalam hal operasi ramah lingkungan, sosialisasi telah dilaksanakan di lingkungan kantor dan selain itu, Bank juga telah menerbitkan Surat Kewaspadaan yang berisi informasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari budaya perusahaan terkait dengan peduli lingkungan.

Efisiensi Penggunaan Kertas

Kertas merupakan kebutuhan penting dalam operasional Bank. Kertas antara lain dipakai untuk administrasi perkantoran, seperti surat– menyurat, memo, mencetak berbagai laporan perusahaan, pendaftaran, dan pencetakan buku nasabah, pencatatan transaksi setoran, penarikan dan lain– lain. Bank menyadari bahwa bahan baku kertas adalah bubur kayu yang didapat dari penebangan kayu. Karena itu, Bank berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penghematan penggunaan kertas. Dengan penghematan kertas, maka Bank turut mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, seperti penebangan pohon dan emisi gas rumah kaca.

Tahun 2025, beban pembelian kertas di Bank secara umum mengalami sedikit peningkatan dari nominal Rp 9 juta tahun 2024 menjadi Rp 10 juta di tahun 2025. Kedepannya salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan kertas bekas (sisi sebaliknya) untuk mencetak draft surat/memo.

Ke depan dengan adanya penerapan digitalisasi pelaporan yang dicanangkan oleh OJK melalui POJK No. 23 Tahun 2024 yang menggeser penyampaian laporan secara luring (*offline*) menjadi daring (*online*) membantu Industri BPR untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).

Efisiensi Penggunaan Listrik

Listrik digunakan untuk penerangan, penggerak sarana– prasarana kantor seperti mesin fotokopi, AC, Komputer dan sebagainya. Bank menyadari bahwa sebagian besar listrik yang dipakai saat ini bersumber dari PLTU, yang menggunakan batu bara sebagai sumber pembangkit, yang termasuk sumber energi tak terbarukan. Oleh karena ketersediaan listrik semakin terbatas, Bank berupaya untuk melakukan efisiensi sehingga tidak terjadi pemborosan energi.

Berdasarkan tabel diatas terlihat pemakaian listrik selama tiga tahun terakhir di Bank Kantor mengalami penurunan, sehingga program hemat energi yang dicanangkan Bank dapat

terlaksana dengan baik.

Efisiensi Penggunaan Air

Bank telah memulai inisiatif sederhana dalam upaya efisiensi penggunaan air dengan menumbuhkan kesadaran untuk menghemat air melalui pemasangan stiker dan poster di lokasi dimana air bersih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai.

Efisiensi Penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak)

BBM dipakai juga untuk kendaraan operasional kantor. Sementara itu, selain dipakai untuk menggerakkan genset, BBM dipakai juga untuk kendaraan operasional kantor. Kategori yang sama berlaku untuk jenis BBM yang digunakan Bank, yaitu bensin dan solar.



Aspek Sosial

Tabel 2.3 Ikhtisar Kinerja Aspek Sosial

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	2025	2024	2023
Dana Sosial Yang Disalurkan	7.100.000	3.050.000	13.750.000



Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) haruslah senantiasa ditanamkan kepada seluruh pegawai agar dapat menjadi budaya yang mampu mendukung keberlanjutan operasional Bank. K3 merupakan aspek penting yang wajib diterapkan di seluruh kegiatan operasi, dalam bekerja dengan sesama pegawai, melayani nasabah, bahkan berinteraksi dengan keluarga maupun orang lain.

Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat berkontribusi untuk mendukung iklim kerja yang kondusif sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Guna memastikan hal ini, peran pegawai sangatlah penting. Oleh karena itu Bank melibatkan pegawai dalam strategi dan kebijakan terkait K3, diantaranya mencakup:

- a. Memastikan fasilitas kantor dalam kondisi sangat baik
- b. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman mengenai budaya K3
- c. Meningkatkan peran dan fungsi semua sektor dalam pelaksanaan K3.



3. Profil Bank

Informasi Umum Perusahaan	
Nama Perusahaan	PT BPR NBP 7
Alamat	JI Sutomo No.80 Sondi Raya,Kel Sondi Raya ,Kec Raya,Kabupaten Simalungun
Nomor Telepon	0622.331131
Email	bpr_nbp07@yahoo.com
Website	bprnbp7.blogspot.com

Skala Usaha Bank

Total Aset dan Kewajiban

Jumlah aset di tahun 2025 sebesar Rp 55.49 Milyar mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir. Demikian juga kewajiban mengalami peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya menjadi Rp 47.13 milyar.

Deskripsi	2025	2024	2023
Aset	55,497,861	46,959,814	40,710,064
Kewajiban	47,132,514	39,049,276	32,763,455

Jumlah pegawai

Sepanjang tahun 2025 Bank memiliki SDM total 45 personal yang terdiri dari Pengurus dan Pegawai dengan besaran gaji minimal sesuai upah minimum Pemerintahan kabupaten Simalungun

Persentasi Kepemilikan Saham

No	Nama	Jumlah Lembar Saham	Nominal	Proporsi
1	PT NBP	4,849,973	4,849,973,000	97.00%
2	Bonardo P H Sinaga	150,027	150,027,000	3.00%
		5,000,000	5,000,000,000	100.00%



Produk dan Layanan

Produk

Jenis Produk	Deskripsi
Tabungan	1.Tabungan Martabe
	2.Tabungan Pundi
	3.Tabungan Pelajar
	4.Tabungan Sempel
	5.Tabunganku
Deposito	1.Deosito Maduma
Kredit	1.Kredit Plate Rate
	2. Kredit Berjangka
	3. Kredit Tanpa Jaminan

Profil Singkat dan Nilai Keberlanjutan Bank

a. Visi Keberlanjutan

Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

b. Misi Keberlanjutan

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat
2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup

c. Keanggotaan Pada Asosiasi Regional hingga Nasional

Menjadi anggota Perbarindo (Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat)



Penjelasan Lainnya

Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4. Penjelasan Direksi

Penjelasan Direksi

Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Bank berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai keberlanjutan dengan menjadi Bank yang terpercaya dan unggul dalam memberikan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Nilai keberlanjutan tersebut diimplementasikan melalui strategi utama dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko, serta peningkatan pertumbuhan portofolio kredit atau pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan, khususnya sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sektor UMKM merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, dan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia khususnya menyerap tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.



Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), BPR menetapkan RAKB dengan rencana 5 (lima) tahun sebagai Rencana Aksi dalam Jangka Panjang. Selain itu, Bank juga memiliki Rencana Aksi dalam Jangka Pendek (satu tahun) yang ditetapkan di tahun 2025.

Target yang ditetapkan oleh Bank yaitu pegawai telah mengikuti sosialisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan menerapkan operasional perbankan hijau.

Laporan Keberlanjutan ini berisi komitmen, strategi dan kinerja pencapaian kami terkait Keuangan Berkelanjutan. Adapun komitmen kami adalah:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha terutama dalam pemberian kredit.
2. Menjalankan operasional perusahaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan kompetensi staf pada pemahaman terhadap sosial dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam setiap kegiatan usaha bank.
4. Menerapkan perbankan yang inklusif dengan menyediakan dukungan akses keuangan bagi segenap masyarakat .
5. Berpartisipasi dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Strategi Pencapaian Target

Bank senantiasa meningkatkan strategi- strategi keberlanjutan khususnya dalam memitigasi risiko yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha Bank. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, BPR tidak terlepas dari berbagai risiko di antaranya risiko pada aspek ekonomi,

sosial dan lingkungan. Namun, risiko tersebut telah dikelola secara optimal oleh Bank dengan berbagai upaya mitigasi yang dilakukan.

Tantangan utama saat ini di awal peletakan pondasi batu pertama keuangan berkelanjutan adalah komunikasi dan membuat para pemangku kepentingan sadar akan pentingnya penerapan keuangan berkelanjutan dalam operasional dan bisnis perusahaan. Namun demikian, kami sangat percaya bahwa ke depannya terdapat peluang penyaluran dana yang besar terkait dengan Keuangan Berkelanjutan.

Selama tahun 2025, BPR NBP 7 belajar untuk menjadi lebih baik dalam layanan keuangan berkelanjutan. Kami berharap adanya kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, regulator dan asosiasi untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BPR NBP 7 kedepannya akan terus menargetkan implementasi keuangan berkelanjutan, antara lain peningkatan pengetahuan semua jenjang organisasi mengenai keuangan berkelanjutan, menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada lingkungan dan sosial dalam operasional keseharian, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan portofolio produk keuangan berkelanjutan.

Dalam merealisasikan keuangan berkelanjutan, perlu adanya harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta permasalahan lingkungan lainnya yang menjadi tanggung jawab kita semua. Kami berpartisipasi memberikan kontribusi dalam mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional dan bisnis kami.



Apresiasi



BPR memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama- sama berkontribusi dalam penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan di BPR NBP 7 Dukungan dan rasa percaya yang diberikan kepada kami, menjadi kekuatan kami untuk mampu memberikan dan menciptakan nilai keberlanjutan bagi semua pihak. Harapan kami adalah seluruh pemangku kepentingan dapat terus memberikan dukungan serta kerja samanya agar kami mampu tumbuh secara berkelanjutan dan kerjasama yang baik dalam mengelola isu- isu keberlanjutan.

5.

Tata Kelola Keberlanjutan

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Tata Kelola yang Baik (GCG – *Good Corporate Governance*) bagi Bank merupakan suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan 5 (lima) Pilar Tata Kelola, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Selain itu, GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika perbankan.

Struktur tata kelola perusahaan BPR NBP 7 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi BPR NBP 7 No. SKDir.Godig/02/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Kebijakan Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik, adalah sebagai berikut:.

1. RUPS: adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris; adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.

Dalam penerapan *good corporate governance*, Perseroan telah memiliki kerangka kerja (*framework*) yang menggabungkan tiga hal yaitu Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*) dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Kerangka kerja dan operasional ini diharapkan mampu memberikan hasil berupa perwujudan ekspektasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan.

1. Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan

mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang merupakan salah satu kebijakan spesifik Bank.
2. Memberikan persetujuan terhadap RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

2. Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan mengusulkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada Dewan Komisaris.
3. Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) kepada Dewan Komisaris.
4. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
5. Memantau satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan.

Sebagai BPR (Bank Perekonomian Rakyat) yang memiliki modal inti di bawah Rp 50 milyar, BPR NBP 7 berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Penerapan keuangan berkelanjutan di BPR NBP 7 secara umum menjadi tanggung jawab Direktur Utama sebagai pemimpin tertinggi di BPR NBP 7. Namun, dalam pelaksanaannya, Direktur Utama telah menugaskan Direktur Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan yang membawahi Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai koordinator Tim Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang bertugas melakukan penyusunan, monitoring, dan penyampaian atas penerapan keuangan berkelanjutan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan penyampaian hasil pelaksanaan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam bentuk Laporan Keberlanjutan dilakukan oleh Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Koordinator Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan.

Adapun tugas dan tanggung jawab **Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan** adalah sebagai berikut:

Ketua (Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan):

1. Memastikan bahwa Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan Unit Kerja Pengelola telah melaksanakan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bersama- sama dengan Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan merekomendasikan hasil penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan hasil pemantauan Keuangan Berkelanjutan kepada Direksi sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris.

Koordinator (Bagian Kepatuhan dan Manajemen Kepatuhan):

1. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan seluruh anggota Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan serta Unit Kerja terkait hal- hal sebagai berikut: (a) Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); (b) Pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan (c) Penyusunan Laporan Berkelanjutan;
2. Menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tugas dan tanggung jawab tersebut pada butir (i) di atas kepada Ketua Tim, Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
3. Menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Berkelanjutan sebelum batas akhir penyampaian sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Pembekalan dilakukan melalui pemberian pelatihan yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2025 dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim. Materi yang disampaikan mencakup prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan kategori kegiatan yang tergolong sebagai KUB. Dengan demikian, Bank berharap dapat mengembangkan portofolio produk yang termasuk dalam kategori KUB di masa mendatang.

1. Sosialisasi Keuangan Berkelanjutan Tahap 1 sesuai POJK No. 51 yang dilakukan oleh Bagian Kepatuhan kepada SDM pada tanggal 02 Februari 2024 yang diikuti oleh 35 orang.
2. Sosialisasi program kerja implementasi keuangan berkelanjutan kepada seluruh SDM pada tanggal 5 Maret 2024 yang diikuti 32 orang.
3. Refres kembali tentang keuangan berkelanjutan yang diikuti seluruh SDM



Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Bank berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait aspek lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko Bank, melalui penyusunan kebijakan perkreditan maupun prosedur terkait portofolio produk yang termasuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Kebijakan dan prosedur tersebut telah menjadi bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan Bank yang ditargetkan dapat tersedia pada tahun 2025.

Untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, Bank akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Bank mengidentifikasi pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan pengaruh dan dampaknya terkait keuangan berkelanjutan.

Peluang dan Tantangan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Kesadaran mengenai prinsip keuangan berkelanjutan telah menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi dalam implementasi dan praktiknya selama tahun 2025 sehingga diperlukan ditingkatkan konsistensi pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Di



sisi lain, Bank mengidentifikasi adanya peluang dalam pembiayaan berkelanjutan terutama untuk melayani segmen ritel dan UMKM untuk mendorong akselerasi usaha berwawasan lingkungan di masyarakat.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua penerapan keuangan berkelanjutan di BPR Nusantara Bona Pasogit Tujuh. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran karyawan. BPR NBP 7 di tahun 2025 pertama sekali menerapkan keuangan berkelanjutan masih fokus pada pengembangan pengetahuan dan kesadaran penerapan keuangan berkelanjutan kepada seluruh pegawai.
2. Penerapan keuangan berkelanjutan juga membutuhkan kerja sama dan dukungan penuh dari Pemerintah setempat, pelaku bisnis dan masyarakat
3. Kesadaran nasabah dan pemangku kepentingan juga diperlukan untuk mendukung dan menerapkan keuangan berkelanjutan. Pengembangan organisasi, produk dan kebijakan internal yang perlu disusun dan dikembangkan memerlukan waktu dan pengetahuan yang cukup terkait Keuangan Berkelanjutan.

6. Kinerja Keberlanjutan

1. Kinerja Ekonomi

Tabel 6.1.1. Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi

Nominal uang dalam jutaan rupiah

Keterangan	2025	2024	2023
Kinerja Keuangan			
Total Aset	55.497.860.870	46.959.813.763	40.710.063.643
Aset Produktif	50.891.801.445	51.402.846.213	41.522.241.607
Kredit/Pembiayaan Bank	42.410.875.445	35.024.248.528	30.688.512.104
Dana Pihak Ketiga	37.764.435.367	34.328.067.035	31.436.591.000
Pendapatan Operasional	13.887.263.949	10.591.292.493	9.875.164.544
Beban Operasional	11.275.406.282	8.856.673.568	8.049.664.385
Laba Bersih	2.001.119.999	1.546.310.687	1.582.889
Rasio Kinerja (Dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM)%	25,32%	30,81%	33,69%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif%	4,94%	3,09%	3,32%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif%	5,39%	3,17%	3,36%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif%	2,09%	0%	0%
NPL gross%	6,48%	4,15%	4,40%
NPL nett%	3,96%	1,18%	1,29%
Return on Asset (ROA)%	4,94%	4,32%	4,95%
Return on Equity (ROE)%	27,16%	21,63%	26,97%
Net Interest Margin (NIM)%	20,80%	19,75%	18,27%
Rasio Efisiensi (BOPO)%	81,19%	83,63%	81,51%
Loan to Deposit Ratio (LDR)%	100,16%	93,58%	81,64%



Terdapat peningkatan aset dan Laba BPR Nusantara Bona Pasogit Tujuh di sepanjang tahun 2025 jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 6.1.2. Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Nominal uang dalam jutaan rupiah

Keterangan	2025	2024	2023
Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan			
Penghimpunan Dana (Rp)	0	34.328.067.000	30.436.591.000
Penyaluran Dana (Rp)	0	35.024.249.000	30.688.512.000
Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	0	28.678.149.000	29.999.494.000
Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	0	0	0
Total Non-Kredit/Pembiayaan Non-Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	0	0	0
Persentase total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan (%)	0	0	0

Penghimpunan dana mengalami kenaikan di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dan 2023



2. Kinerja Sosial

Komitmen Perusahaan

BPR NBP 7 memberikan layanan merata kepada seluruh nasabah tanpa memandang kelas pendapatan masyarakat.

Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

BPR memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai dengan memberikan pengupahan/ penggajian sesuai dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/ Kota) di Kabupaten Simalungun

Kinerja Sosial Terhadap Masyarakat

Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh ikut berkontribusi memberikan sebagian dari laba yang disisihkan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

3. Kinerja Lingkungan Hidup

Kegiatan Internal dan Kegiatan TJSL



BPR Nusantara Bona Pasogit Tujuh mewujudkan operasional bank ramah lingkungan dengan menerapkan berbagai kebijakan sesuai prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sosialisasi atas prinsip-prinsip ini terus dilakukan agar tujuan awal yang ditetapkan Perusahaan tercapai. Operasional kantor yang ramah lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan bahan baku/material, energi, dan air agar semua bisa lebih efisien. Dengan upaya itu, maka selama tahun pelaporan, operasional BPR Nusantara Bona Pasogit Tujuh tidak membawa dampak buruk bagi keanekaragaman hayati di lingkungan BPR.

Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

Perusahaan juga menerapkan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan termasuk mengganti penggunaan gelas plastik dengan *tumbler* yang disiapkan pegawai masing-masing.

Tabel 6.3.1. Uraian Penggunaan Energi

Keterangan	Penggunaan Pada Tahun Laporan
Listrik (kWh)	826,50
Volume Air dari PDAM (meter kubik)	0
Volume Air dari Sumur (meter kubik)	0

4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebagai entitas bisnis, BPR NBP 7 senantiasa berupaya agar eksistensinya semakin maju dan berkembang. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi dan pengembangan produk dan layanan dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini yang sangat pesat sebagai faktor pendorong pergeseran perilaku masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, rasa aman dan kenyamanan dalam bertransaksi perbankan.

Dalam melakukan inovasi, BPR NBP 7 melakukannya dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kebijakan perusahaan. Adapun inovasi dan pengembangan produk/jasa yang dilakukan BPR Nusantara Bona Pasogit Tujuh selama tahun 2025 antara lain meluncurkan Program Kredit BPR NBP 7, dan Tabungan Go Digital.

Selain itu, Perusahaan juga mengembangkan program kredit Scoring, program Pembuatan Aplikasi Monitoring Kredit, dan Pengembangan Web Based Laporan Tahunan bekerja sama dengan Vendor.

Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan

Semua produk dan jasa yang ditawarkan BPR NBP 7 telah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah teruji keamanannya bagi nasabah. Selaras dengan itu, untuk menekan risiko kerugian seminimal mungkin atas produk dan jasa tersebut, Perseroan secara kontinu menyampaikan informasi atas semua risiko yang mungkin terjadi kepada nasabah, seperti risiko pasar dan risiko fluktuasi mata uang. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran, formulir Ringkasan Informasi Produk dan layanan (RIPLAY) maupun secara tatap muka.

Sejalan dengan itu, sesuai regulasi yang ada, BPR NBP 7 juga melakukan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara berkala sehingga calon nasabah atau nasabah mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk/ jasa yang ditawarkan Perseroan. Dengan demikian, mereka akan melakukan investasi sesuai kebutuhan dan telah mengetahui profil risiko yang melekat di dalam produk/jasa tersebut.



Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR NBP 7 telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka BPR Nusantara Bona Pasogit Tujuh akan memberikan dana dengan memegang prinsip kehati-hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya itu membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan BPR Nusantara Bona Pasogit Tujuh pada tahun pelaporan.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal BPR NBP 7 maupun perintah dari regulator (OJK).

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR Nusantara Bona Pasogit Tujuh belum melakukan survey terhadap kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, namun di sepanjang tahun 2025 tidak ada komplain dari nasabah atau masyarakat terhadap produk dan jasa Bank yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Umpan Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah sekaligus penerapan evaluasi BPR Nusantara Bona Pasogit Tujuh yang bertujuan meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang, BPR Nusantara Bona Pasogit Tujuh menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir Laporan Keberlanjutan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

BPR Nusantara Bona Pasogit Tujuh memberikan akses informasi seluas- luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, dan investor serta siapa saja yang memberikan umpan balik (*feedback*) mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi:

Linda S Sinaga
Pejabat Eksekutif Audit Internal
PT BPR NBP 7
Jl. Sutomo No 80 Sondi Raya, Kelurahan Sondi Raya
Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun (0622).331131

Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 ini merupakan yang kedua kali oleh karenanya belum mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Bank akan terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi segenap pembaca.



LAPORAN DEMOGRAFI PEGAWAI PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh TAHUN 2025

1. Demografi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

No	Level Organisasi	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Direksi	1	1	2	4.44%
2	Pejabat Eksekutif	1	3	4	8.88%
3	Pelaksana	25	14	39	86.68%
	Jumlah	28	17	45	100%

2. Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	S1	16	12	28	68.29%
2	Sarjana	0	0	0	0%
3	Diploma	3	2	5	12.19%
4	Lainnya / Tidak Diketahui	7	1	8	19.52%
	Jumlah	26	15	41	100%

3. Demografi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Tetap	22	12	34	82.93%
2	Kontrak	4	3	7	17.07%
	Jumlah	26	15	41	100%



4. Demografi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

No	Rentang Usia	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Di Atas 50 Tahun	3	1	4	9.76%
2	41 s/d 50 Tahun	2	2	4	9.76%
3	31 s/d 40 Tahun	12	5	17	41.46%
4	21 s/d 30 Tahun	8	7	15	36.58%
5	18 s/d 20 Tahun	1	0	1	2.44%
	Jumlah	26	15	41	100%

5. Demografi Pegawai Berdasarkan Generasi

No	Generasi	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Baby Boomers 1946 - 1965	0	0	0	0.00%
2	Generation X 1965 - 1980	3	1	4	9.76%
3	Generation Y (millennials) 1981 - 1996	14	9	23	56.09%
4	Generation Z 1997 - 2012	9	5	14	34.15%
	Jumlah	26	15	41	100%

NIHIL

